

Kecenderungan Globalisasi Media Massa

A. Muis

Pengantar

MEMBICARAKAN masalah globalisasi media massa dan informasi sebenarnya kita berhadapan dengan masalah menipisnya batas-batas sistem komunikasi, budaya komunikasi dan hukum komunikasi di masing-masing negara.

Globalisasi media massa berawal pada kemajuan teknologi komunikasi dan informasi semenjak dasawarsa 1970-an. Di dalam pengertian itu kita harus bertemu dengan istilah-istilah banjir informasi, era informasi, masyarakat informasi, era komputerisasi dan era satelit. Arus informasi meluas ke seluruh pelosok dunia. Jaringan komunikasi masyarakat di masing-masing negara mengalami pembesaran volume informasi maupun kecepatan penyebaran informasi.

Globalisasi informasi dan media massa menciptakan keseragaman pemberitaan maupun preferensi acara liputan. Masing-masing sistem media seakan-akan menjadi

bagian dari suatu jaringan informasi dan komunikasi internasional. Kegemaran masyarakat di seluruh dunia untuk memilih berita-berita luar negeri yang dipandang penting cenderung seragam (*audience agenda*). Dengan sendirinya sistem media di masing-masing negara juga cenderung seragam dalam hal menentukan kejadian yang dipandang penting untuk diliput (*media agenda*). Apa yang terjadi di suatu tempat yang terpencil di pelosok dunia akan segera diketahui oleh seluruh dunia pada saat yang hampir bersamaan. Peristiwa yang terjadi di sebuah negara akan segera mempengaruhi perkembangan masyarakat di negara-negara lain. Menurut istilah John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1991) dunia kini menjadi sebuah *global village*.

Sekarang dan di masa mendatang terjadi interdependensi pemberitaan di antara masing-masing sistem media di seluruh dunia. Kejadian-kejadian yang diliput oleh *Reuter* atau *CNN*, misalnya, pada saat yang hampir bersamaan diberitakan pula oleh Kantor Berita *Antara*, *TVRI*, *RCTI*, Kantor Berita

Bernamea dan *RTM*, atau sebaliknya. Banjir besar dan angin topan dahsyat di Bangladesh pada bulan Juni tahun 1991 dan banjir di Cina bagian timur tanggal 3 Agustus 1991 mempengaruhi sensitivitas media massa di seluruh dunia. Bahkan juga mempengaruhi kepedulian sosial di kalangan masyarakat internasional dan para pejabat tinggi di semua negara. Jaringan komunikasi sosial di masing-masing negara membukakan diri terhadap arus informasi yang menyangkut semua macam peristiwa. Tidak ada lagi kejadian sekecil apapun di semua negara yang mampu menutup diri dari liputan media. Keadaan tersebut sudah tentu membawa serta perubahan bagi konsep-konsep jurnalistik serta kriteria nilai berita. Semua orang dan semua peristiwa setiap saat dapat menjadi pencipta berita (*newsmaker*) bagi semua media.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi¹ menghadirkan aneka ragam *saluran (media)* yang kian lama kian canggih dan memungkinkan segala macam kejadian meladak menjadi berita yang dramatis di seluruh dunia. Arus berita berlangsung kian cepat. Volumennya serta frekuensinya pun kian besar. Sebagai contoh ialah pers (media cetak). Produksi berita-berita pers kian lama kian besar dan beraneka ragam (diversifikasi) dengan kecepatan yang kian mencengangkan. Hal itu terjadi karena dukungan fax, jaringan telepon antar negara, komputer dan cetak jauh. Perubahan atau kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang luar biasa itu menimbulkan konsekuensi-

¹Konsep informasi kini disamakan dengan data yang diproses dengan komputer. Dalam ilmu komunikasi arti informasi adalah segala sesuatu yang belum diketahui atau yang meniadakan ketidakpastian tentang dua atau lebih kemungkinan (alternatif) yang dihadapi. Biasa disebut "angka-angka ganda" (binary digits/bits).

konsekuensi teknis bagi konsep-konsep jurnalistik, kriteria nilai berita maupun hukum media massa.

Kesegaran berita (ciri aktualitas komunikasi pers) mengatasi kendala geografis (*global timeliness*). Begitu pula kriteria nilai berita *proksimitas* akan memperoleh sifat-sifat baru sebagai akibat mengkerutnya jarak antara berbagai tempat di dunia oleh kecepatan pengiriman informasi. Kedekatan tempat kejadian dengan redaksi sebuah penerbitan (stasiun media elektronik) sifatnya cenderung menjadi relatif sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi/informasi. Proksimitas geografis antara sumber berita atau peristiwa berita dan redaksi media tidak lagi terlalu ditentukan oleh faktor "jauh-dekat". Semua tempat seakan-akan berdekatan dengan redaksi media di seluruh dunia. Pengertian *proksimitas global* kini dapat diperkenalkan sebagai proksimitas berita yang netral terhadap proksimitas kultural, politis, psikologis maupun sosiologis.

Gejala tersebut kian jelas kelihatan dalam cara pemberitaan media massa di Indonesia sejak tahun 1970-an. Kejadian-kejadian di mancanegara kerap kali meraih persentase yang cukup tinggi dalam kolom-kolom berita media massa di Indonesia.

Tata Komunikasi dan Informasi Dunia Baru

Kini masalah ketimpangan arus informasi internasional seakan-akan *mereda*. Tidak lagi seperti dahulu tatkala masalah itu bergema nyaring dalam sidang-sidang Majelis Umum PBB antara tahun 1970-1980. Anggota-anggota dari Negara-negara Dunia Ketiga (Selatan) menuntut ditegakkannya

Tata Informasi dan Komunikasi Dunia yang Baru (*A New World Information and Communication Order*). Yakni sebuah tata informasi dan komunikasi yang lebih adil dan berimbang antara Utara dan Selatan (*fair and balanced flow of information between North and South*). Negara-negara Barat ternyata hanya memperhatikan apa yang mereka sebut "free flow" atau arus informasi internasional yang bebas tanpa kekangan oleh masing-masing sistem nasional.

Isu ketimpangan arus pemberitaan internasional itu menjadi lebih hangat (memuncak) menyusul sebuah resolusi dari Sidang Majelis Umum PBB No. 3201 tentang Tata Ekonomi Dunia Baru. Negara-negara Dunia Ketiga berpendapat, bahwa kurang masuk akal jika mewujudkan sebuah tata ekonomi baru tanpa dilengkapi (didukung) dengan tata informasi dunia baru pula. Sebuah tata informasi dunia baru yang lebih adil (*just*) sangat perlu ditegakkan sebagai bagian integral dalam upaya menciptakan tata ekonomi dunia baru.

Apa yang sedang kita hadapi sekarang seakan-akan merupakan babak penutup kisah ketimpangan arus informasi internasional pada dekade 1970-an dan 1980-an itu. Kini hadir globalisasi ekonomi bersama dengan banyak macam globalisasi lainnya, termasuk globalisasi media massa dan arus informasi. Tidak ada lagi isu divergensi antara tata ekonomi dunia baru dan tata informasi dan komunikasi dunia baru. Sebab kedua fenomena itu kini mengalami proses konvergensi atau pertemuan secara global. Keduanya bersama dengan bidang-bidang lain seakan-akan dipersatukan untuk membentuk sebuah *sistem global* untuk masing-masing bidang. Kini seakan-akan ada sistem informasi dan komunikasi global, sistem hukum global, sistem budaya global,

sistem pendidikan global dan sebagainya.

Memang sekarang dan di masa datang jaringan pemberitaan internasional masih tetap didominasi oleh lembaga-lembaga media massa Dunia Kesatu seperti *Reuter, AFP, AP, UPI, BBC, ABC, VOA* dan lain-lain. Akan tetapi ketergantungan Dunia Ketiga kepada layanan informasi dari Dunia Kesatu tidak lagi terlalu merupakan masalah penting sebab materi pesan atau materi informasi yang tersebar lewat jaringan media internasional itu sudah pula menjadi global. Misalnya hiburan, olah raga, politik, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya. Preferensi dan kegemaran *audience* sudah global, sudah sama di mana-mana. Dengan demikian khalayak media tidak lagi merasa perlu untuk menilai apakah informasi, hiburan dan sebagainya yang tersebar melalui jaringan komunikasi massa Dunia Kesatu atau Barat menciptakan ketimpangan arus informasi internasional atau tidak. Perilaku komunikasi (*media habit*), gaya hidup, kegemaran, jenis-jenis makanan, pakaian, kendaraan, olah raga dan pola konsumsi maupun pola hidup, sudah seragam di seluruh dunia atau sudah menjadi global.² Boleh dikatakan kini globalisasi media massa telah menghadirkan "manusia internasional" atau "manusia global". Globalisasi memang bersifat lintas bangsa dan lintas budaya. Bahkan yuridiksi dan sistem politik di masing-masing negara cenderung kabur. Seakan-akan media massa global secara otomatis menawarkan pula sistem hukum dan sistem politik global.

Dahulu isu ketimpangan informasi internasional biasa diidentikkan dengan terjadinya *imperialisme budaya*. Artinya, arus informasi satu arah (*one-way flow of world*

²Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *MEGATRENDS 2000* (Februari 1991), 115-129.

communication) tidak sekedar mempunyai sifat kuantitatif; ia juga mempunyai sifat kualitatif. Volume informasi yang berlangsung timpang itu mengandung pula nilai-nilai komunikasi politik, budaya maupun ekonomi, untuk kepentingan negara-negara Utara (Barat). Misalnya, tayangan-tayangan hiburan dan siaran-siaran tentang kegiatan politik Amerika dan negara-negara Eropa Barat melalui jaringan media siaran (Radio dan TV), film, sinetron dan kaset video. Informasi budaya, politik, ekonomi dan hiburan yang demikian menyebabkan sistem media di negara-negara Dunia Ketiga bersama khalayak (*audience*) makin lama makin cenderung membukakan diri terhadap nilai-nilai asing (Barat) yang tentu saja tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai budaya masing-masing bangsa (negara) Dunia Ketiga. Film-film nasional, misalnya, banyak meniru tema maupun teknik-teknik sinematografi seperti penyutradaraan, penulisan skenario dan setting budaya film-film Barat. Khalayak media pun demikian; menggemari berita-berita yang bersumber dari jaringan media Barat (Dunia Kesatu) maupun film-film dan sinetron-sinetron Barat.

Budaya Komunikasi Global

Globalisasi media massa menghadirkan budaya komunikasi global. Dengan demikian pengertian tentang arus informasi dan komunikasi internasional yang timpang cenderung menghilang. Demikian pula pengertian "cultural imperialism"³ yang "melekat" pada kehadiran arus informasi dunia yang timpang, cenderung menghilang. Kedua fenomena komunikasi massa tersebut

cenderung menyatu (mengalami proses konvergensi) dengan arus globalisasi di segala bidang. Seakan-akan seluruh penduduk planet bumi ini tiba-tiba terseret oleh arus budaya kosmopolit, dan semua warga negara di masing-masing negara menerima *budaya komunikasi kosmopolit*.

Dasawarsa 1970 dan 1980-an menyaksikan terbentuknya banyak lembaga pertukaran berita antara negara-negara Dunia Ketiga. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi ketimpangan arus informasi internasional (antara Utara dan Selatan). Akan tetapi peranan jaringan pemberitaan negara-negara yang sedang berkembang tersebut kini agaknya tidak lagi mempunyai arti penting, karena khalayak media di masing-masing negara Dunia Ketiga telah mengalami proses pembudayaan komunikasi yang bersifat kosmopolit. Di tengok dari sudut media massa, kini sejarah sedang menyaksikan hadirnya masyarakat manusia kosmopolit. Di samping itu, materi peliputan atau peristiwa-peristiwa yang diberitakan kian seragam di masing-masing negara. Dengan istilah yang lebih teknis, fungsi pilihan acara media massa (*agenda setting function of the mass media*) di masing-masing negara menjadi seragam. Begitu pula pilihan acara di pihak khalayak media (*audience agenda*) menjadi homogen di seluruh dunia.

Lembaga-lembaga pertukaran berita di antara negara-negara Selatan seperti *OANA*, *ANN*, *Islamic News Agency Exchange*, lembaga pertukaran berita non-blok dan *Asia Vision*, seakan-akan tidak lebih penting dari sekedar suatu manifestasi politik.

Kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang luar biasa, termasuk telekomunikasi, seakan-akan menjadikan dunia ini kian

³A. Muis, *The Jakarta Post*, 11 Agustus 1983.

kecil (dusun global). Kini muncul *seminar jauh*, pertemuan jarak jauh atau rapat jarak jauh, kuliah jauh dan sebagainya. Komunikasi interaktif (*interactive media*) atau sistem telekomunikasi lintas penerima (*transceiver telecommunication system*) tersebut seakan-akan menjadikan mimpi *dunia selebar daun kelor* kini menjadi kenyataan.

Pada sisi yang lebih khusus, kita bisa melihat terjadinya konvergensi (ketercampuran) antara jaringan komunikasi sosial dari satu negara dan dari negara lain. Di lihat dari sudut masing-masing negara, ada ketercampuran antara jaringan komunikasi sosial eksternal dan internal (nasional). Jalannya keterkaitan jaringan komunikasi masyarakat tersebut secara internasional melibatkan baik komunikasi *formal* (media massa dan telekomunikasi) maupun yang *non-formal*, yang biasanya didominasi oleh lembaga penokohan opini (*opinion leadership*). Pertemuan jaringan-jaringan komunikasi sosial tersebut pada akhirnya melibatkan pula stratifikasi sosial di masing-masing negara. Mau tak mau jaringan komunikasi sosial pada lapisan pejabat (lembaga-lembaga birokrasi) pun tersentuh globalisasi komunikasi. Artinya, kita sekarang menyaksikan lahirnya *pejabat-pejabat global*, di samping pengusaha-pengusaha global, ilmuwan-ilmuwan global, budayawan-budayawan global, novelis-novelis global dan aktor-aktor film global.

Pada tingkat pedesaan terutama di negara-negara yang sedang berkembang terjadi pula perubahan yang luar biasa sebagai akibat globalisasi media massa. Paling sedikit, ada dua corak perubahan yang dialami oleh jaringan komunikasi masyarakat pedesaan. *Pertama*, hadirnya lapisan sosial desa yang berperilaku kosmopolit. *Kedua*, sebagai

dampak perubahan pertama, terjadi proses desentralisasi dan diversifikasi dalam tradisi ketokohan opini. Tokoh-tokoh opini yang non-formal (di samping yang berstatus resmi) harus menjadi *monomorfis* karena terjadinya proses *pluralisasi* nilai-nilai maupun perilaku warga desa. Ketokohan pendapat tidak lagi terpusat pada sekelompok orang (jaringan kecil) tradisional seperti ulama, guru mengaji, guru sekolah, imam desa, sesepuh desa, turunan bangsawan dan sebagainya. Ia menyebar (meluas) keluar dari pusat-pusat ketokohan pendapat tersebut kepada warga-warga lain yang berstatus resmi maupun tidak resmi. Misalnya PPL, dokter-dokter Puskesmas, bidan-bidan beranak, mahasiswa-mahasiswa KKN maupun ahli-ahli pertanian.

Akan tetapi pada sisi lain globalisasi informasi dan komunikasi tidaklah sepenuhnya membawa serta kebahagiaan bagi semua bangsa, semua masyarakat atau semua orang. Pengetahuan yang cenderung seragam dan preferensi terhadap informasi yang juga seragam di masing-masing negara justru dapat menumbuhkan perasaan tidak sama atau kesenjangan internasional dalam berbagai bidang. Para pakar komunikasi di beberapa negara yang sedang berkembang telah lama mengidentifikasi dampak siaran-siaran TV global. Siaran-siaran TV itu membangkitkan perasaan penyesalan di kalangan sejumlah pemirsa di negara-negara yang sedang berkembang tentang nasib mereka yang miskin dan melarat. Masyarakat tani di Amerika Latin, misalnya, merasa diri juga berhak hidup layak seperti yang mereka tonton di TV. Dari sudut teori psikologis komunikasi kejadian itu menggambarkan proses identifikasi optik maupun identifikasi psikologis pada diri pemirsa-pemirsa TV di Amerika Latin itu. Mereka mengidentifikasikan diri dengan kehidupan makmur di negara-

negara asing. Mereka menginginkan agar lingkungan sosial atau negara mereka juga memberikan peluang dan kebebasan kepada mereka untuk hidup seperti halnya di negara-negara maju yang mereka lihat di layar kaca.⁴

Alienasi dan Dehumanisasi Global

Persoalannya kemudian adalah, sejauh mana globalisasi media massa telah membangkitkan *aspirasi* masyarakat di masing-masing negara, ke arah mana aspirasi itu di dorongnya dan sejauh mana dia sanggup menjawabnya. Globalisasi pengalaman atau pengetahuan dapat menyeragamkan aspirasi pada lapisan-lapisan atau kelas-kelas masyarakat tertentu. Akan tetapi ia juga dapat menimbulkan pertentangan dan keanekaragaman aspirasi. Di negara-negara yang sedang berkembang aspirasi buruh dapat bercorak (berorientasi kepada) kebebasan untuk melakukan pemogokan atau demonstrasi. Itulah pengaruh berita-berita tentang kaum buruh di negara-negara asing, yang lebih makmur dan bebas mengajukan bermacam-macam tuntutan, mulai dari upah hingga calon-calon walikota, perdana menteri atau presiden yang dianggap memahami kebutuhan kaum buruh. Aspirasi pegawai juga dapat bercorak demikian. Misalnya merasakan kesenjangan yang besar antara penghasilan (gaji) di negara-negara yang sedang berkembang dan di negara-negara maju. Padahal tugas-tugas dan tanggung jawab sama beratnya. Globalisasi informasi mendatangkan pengaruh yang besar sekali terhadap aspirasi atau kesadaran mengenai

keadaan diri (keterbelakangan) di kalangan bangsa-bangsa yang terbelakang).

Dengan demikian ternyata, bahwa globalisasi media massa maupun informasi banyak menggugah keprihatinan di negara-negara yang kurang maju. Globalisasi itu tidak sanggup memberikan jawaban atau jalan keluarnya. Kegetiran akibat menyadari kesenjangan-kesenjangan sosial ekonomi, kebebasan dan sebagainya akan bertambah karena di dalam negeri pun terjadi kesenjangan. Lapisan tertentu dalam strata sosial sanggup menyamai kemajuan dan kemakmuran di negara-negara maju. Media elektronik khususnya TV menyajikan berita-berita tentang pola hidup mewah dan iklan-iklan barang-barang mewah yang mahal; dapat mendorong budaya konsumerisme di kalangan lapisan sosial yang di bawah, padahal kemampuan ekonomi lapisan itu sangat terbatas. Itu berarti, budaya komunikasi global tidak mendekatkan masyarakat kepada realitas sosial di lingkungannya.

Pada segi itulah terjadi fenomena kemauan yang dapat disebut *dehumanisasi* dan *alienasi*. Banyak orang tidak lagi memiliki kesanggupan untuk menentukan peranannya dalam komunikasi sosial. Mereka dipencilkan dari diri mereka sendiri. Akibat ketergantungan kepada kualitas informasi dan sajian-sajian media massa global banyak orang tidak lagi sanggup memahami kebutuhannya sendiri. Dalam banyak hal nilai-nilai asing itu sudah lama merebut tempat yang strategis dalam perilaku masyarakat. Di sini kita berurusan dengan bidang olah raga, cara berbusana, pemakaian istilah, kepariwisataan dan kemunculan kelas menengah baru dengan pola hidup konsumeristis. Olah raga renang wanita, olah raga bola voli, basket dan angkat besi wanita, tenis wanita dan sebagainya harus menampilkan

⁴David K. Berlo, "The Context for Communication," dalam Gerhard J. Hanneman & William J. McEwen (eds.), *Communication and Behavior*, 1975.

pakaian olah raga global yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma budaya bangsa yang bersangkutan. Globalisasi media massa dan informasi menawarkan pula globalisasi nilai-nilai kultural maupun gaya hidup global.⁵

Dampak atau konsekuensi globalisasi media massa dan informasi adalah terbukanya semua macam saluran komunikasi masyarakat di masing-masing negara. Akibat lebih jauh (rentetan akibat) adalah tidak mudahnya mengendalikan arus nilai-nilai kosmopolit (asing) di sesuatu negara, khususnya negara yang sedang berkembang. Yang perlu dipersoalkan tentulah hanya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun kepribadian nasional dari negara-negara yang bersangkutan. Misalnya, jika di Indonesia, tidak sesuai dengan keperluan pembangunan maupun norma-norma Pancasila.

Meskipun globalisasi informasi dan media massa tidak lagi terlalu relevan untuk dipersoalkan dari sudut isu ketimpangan arus informasi dan komunikasi dunia (internasional), tetap ada masalah *siapa* yang mengontrol dan *nilai budaya apa* yang dominan dalam globalisasi media massa itu.

Benturan Nilai Budaya

Dalam globalisasi media massa dan informasi dunia menyaksikan peranan telekomunikasi dan media elektronik (khususnya TV, film dan rekaman video) yang luar biasa. Dunia kian menjadi kosmopolitan; manusia saling mempengaruhi dalam hal perilaku. Di bagian dunia yang sedang berkembang tanda-tanda kehadiran budaya internasional di kalangan kaum muda hampir terdapat di mana-mana.

Arus globalisasi informasi itu tidak berdiri sendiri. Ia ditemani oleh perdagangan (globalisasi pasar) dan perjalanan jauh dengan transportasi udara yang cepat ("manusia global"). Perdagangan, travel dan TV bersama-sama meletakkan dasar bagi suatu gaya hidup global. Film dan TV seakan-akan menciptakan citra yang serupa bagi kehidupan manusia di seluruh desa global ini.⁶

Akan tetapi, tentu saja, tata nilai budaya maupun tradisi komunikasi di negara-negara yang sedang berkembang (masyarakat-masyarakat tradisional agraris), masih tetap memelihara kelompok sosial yang *konservatif*, atau kelompok *tradisional*. Dalam urusan dengan lapisan atau kelompok sosial yang demikian pandangan haruslah netral, sebab mereka memang mempunyai hak untuk menilai dan mendefinisikan sendiri kebutuhan masyarakat atau bangsa mereka. Sama juga dengan kelompok-kelompok lain yang diberi predikat "modernis" atau "progresif"; mereka pun berhaik untuk menerima inovasi-inovasi atau nilai-nilai asing. Mereka pun seharusnya bebas untuk mendefinisikan kebutuhan bangsa atau masyarakat mereka. Semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menolak atau menerima nilai-nilai asing. Di sini kita berurusan dengan masalah hak asasi.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip kekuasaan, kenegaraan maupun kepemimpinan politik adalah hukum yang universal dalam menghadapi arus globalisasi, arus budaya kosmopolit, nilai-nilai asing (dinamika eksternal) maupun perubahan dari dalam. Kelompok yang duduk di puncak piramida masyarakat itu biasanya dijadikan faktor penentu kebijaksanaan. Artinya, para pe-

⁵John Naisbitt (*ibid.*).

⁶*Ibid.*

mimpin itulah yang telah diberi wewenang untuk menerapkan *acuan dasar* dan mempertahankan hukum (undang-undang). Acuan dasar itu bisa berupa Pancasila, sosialisme, liberalisme, Kitab Suci (teokrasi) dan sebagainya. Itu yang dijadikan kriteria atau alat ukur untuk menentukan apakah sesuatu nilai asing dibenarkan atau harus ditolak. Di negara-negara maju yang menganut paham demokrasi liberal sudah tentu acuan dasar atau acuan baku (standar) tersebut adalah undang-undang. Jika sesuatu tingkah laku tidak sesuai dengan undang-undang (misalnya undang-undang hukum pidana) barulah "nilai asing" itu dinyatakan "haram". Di negara-negara yang menganut paham teokrasi (misalnya negara-negara Islam) tentu berlaku hukum Islam sebagai acuan bakunya. Negara-negara lain mempunyai acuan dasar yang lain pula.

Sekitar tiga tahun silam dunia diguncang oleh peristiwa Tiananmen di Cina. Para mahasiswa, para pemuda dan kaum intelektual Cina melakukan demonstrasi berdarah *pro demokrasi*. Dalam tragedi pembantaian politik tersebut sejarah menyaksikan betapa kuatnya arus budaya politik terbuka (demokrasi) melanda negara komunis tersebut. Para penguasa RRC meyakini peristiwa berdarah itu sebagai pengaruh *Barat*.

Salah satu reaksi kultural yang keras lainnya (*backlash*) terhadap Barat ialah revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan mending Imam Khomeini. Sedangkan langkah tegas Khomeini terhadap kasus buku jorok dan brutal Salman Rushdie hanyalah merupakan ujung gunung es yang terapung. Para pengamat Barat juga mengatakan, bahwa kaum fundamentalis Islam mulai memperkuat jatidiri kebudayaan dan agama mereka di Mesir, Turki dan Indonesia. Itu semua adalah reaksi mendasar terhadap cengke-

raman pengaruh Barat.⁷

Dengan demikian, justru karena arus globalisasi semakin menawarkan keseragaman gaya hidup di seluruh planet bumi kita ini, maka timbul pulalah isyarat-isyarat kehadiran sebuah kecenderungan yang berlawanan (*countertrend*). Kecenderungan balik tersebut sangat kuat. Ia diarahkan untuk mengobrak-abrik *uniformitas*. Reaksi keras (*backlash*) itu merupakan keinginan untuk mengukuhkan keunikan (jatidiri) kebudayaan dan bahasa masing-masing bangsa di negara-negara yang sedang berkembang. Ia merupakan penolakan terhadap pengaruh asing.⁸

Reaksi-reaksi keras yang berkonotasi "anti Barat" tersebut menggambarkan pendapat, bahwa yang menguasai arus globalisasi media massa dan informasi tidak lain adalah negara-negara liberal (Barat) dan budaya Barat pulalah yang dominan dalam arus budaya kosmopolit.

Realitas globalisasi media massa yang terjadi sekarang adalah meluasnya *pluralisme* nilai budaya di banyak negara yang sedang berkembang. Perluasan kemajemukan budaya itu agaknya merupakan hasil sebuah benturan antara nilai-nilai budaya asing dan nilai-nilai budaya nasional di negara-negara yang sedang berkembang. Benturan kedua jenis nilai-nilai budaya itu menghasilkan semacam kompromi atau status quo. Yakni bertambahnya kemajemukan budaya dan karena itu pula menjadi kompleksnya sistem budaya negara-negara Dunia Ketiga. Kehadiran *nasionalisme kebudayaan (cultural nationalism)* dapat dianggap sebagai konsekuensi globalisasi termasuk globalisasi informasi dan media massa.

⁷Ibid.

⁸Ibid.

Berubahnya Makna Kebebasan Komunikasi

Ditinjau dari sudut konsep kebebasan komunikasi dan informasi boleh dikatakan globalisasi media massa dan informasi berawal pada pasal 19 Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pasal 19 tersebut merumuskan konsep *freedom of information* yang diterima dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Di dalamnya tergambar dengan jelas gagasan tentang sistem media massa maupun sistem informasi internasional. Kebebasan mempunyai opini dan menyatakan pikiran atau perasaan (*expression*) haruslah dapat dilaksanakan oleh setiap orang tanpa gangguan. Begitu pula kebebasan untuk mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan gagasan boleh mencakup semua macam media (saluran) dan terlepas dari *batas-batas negara*. Bunyi teks aslinya (Inggris) adalah *regardless of frontiers*.

Boleh pula dikatakan, bahwa isu ketimpangan arus informasi sebenarnya berakar pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (kebebasan informasi) tersebut. Negara-negara Dunia Kesatu (Barat) dalam upaya melaksanakan pemberitaan internasional lebih mementingkan prinsip *free flow* tanpa harus terlampau mengindahkan yurisdiksi masing-masing negara maupun sistem-sistem nasional.

Kini arus globalisasi merupakan pengertian yang tidak lengkap tanpa globalisasi media massa dan arus informasi internasional. Begitu pula globalisasi media massa dan informasi, tidak akan memiliki arti yang lengkap jika tidak berurusan dengan konsep kebebasan informasi internasional dan tuntutan sistem-sistem nasional di masing-masing negara.

Gagasan UNESCO yang kemudian timbul tentang kebebasan untuk tidak berkomunikasi pada hakekatnya hanyalah upaya untuk memberikan makna yang lebih lengkap tentang konsep kebebasan informasi (Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights) tersebut.

Gagasan itu berawal dari pikiran beberapa pengamat tentang kebebasan komunikasi dan informasi internasional pada tahun 1970-an.⁹ Kini gagasan tersebut agaknya menjadi lebih relevan dalam arti, apakah arus informasi yang volumenya kian besar dan penyebarannya kian cepat ke seluruh pelosok dunia dapat dianggap suatu kesewenangan komunikasi manusia? Arus informasi cenderung linear, dari satu sumber yang menguasai berbagai saluran penyampaian pesan kepada banyak orang yang berada dalam posisi penerima yang tidak memiliki alternatif. Bukankah industri informasi dewasa ini tidak lagi memberikan cukup kebebasan bagi manusia untuk menyendiri, melepaskan diri dari "serbuan" media massa sepanjang hari? Menonton TV, mendengarkan radio atau membaca surat kabar sudah merupakan *kebutuhan* manusia modern. Jika kita bicara tentang "budaya komunikasi" atau "perilaku komunikasi", itu berarti kita berurusan dengan komunikasi antar pribadi maupun media massa. Kedua macam komunikasi tersebut boleh dikatakan sudah menjadi satu dalam menciptakan kebutuhan sosial. Media massa, khususnya TV, sanggup menjauhkan manusia dari kenyataan hidupnya sehari-hari. TV dapat disebut sebagai sebuah *jendela dunia* yang

⁹Jean d'Arcy dalam buku *Communication and Society Today and Tomorrow, Many Voices One World, Towards New More Efficient World Information Order*. International Communication for the Study of Communication Problems, Paris.

besar. TV mudah menyebabkan penonton-penonton (para pemirsa) menjadi kosmopolit. Adanya budaya TV dan budaya media pada umumnya menjelaskan besarnya ketergantungan manusia kepada media massa untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan hiburan.¹⁰

Andaikata pasal 19 Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia atau konsep *freedom of information* itu diperluas sehingga mencakup hak untuk menolak komunikasi (*freedom not to communicate*), agaknya sulit dilaksanakan. Yang dimaksud tentulah kebebasan untuk tidak menerima informasi melalui media massa, bukan kebebasan untuk tidak berkomunikasi secara umum (bertemu atau berbicara dengan orang-orang lain). Hal itu memang tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan makna komunikasi itu sendiri sebagai kebutuhan pokok makhluk sosial.¹¹

Terjadinya jalinan yang kuat antara media massa dan kebutuhan komunikasi manusia sangat kurang memungkinkan terwujudnya hak untuk tidak berkomunikasi dalam arti membebaskan diri dari terpaan media massa.

Dengan demikian makna kebebasan komunikasi cenderung berubah. Artinya, harus ada kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan sumberdaya komunikasi yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan hidupnya. Implikasinya adalah tersedianya alternatif-alternatif dalam upaya mencari, memperoleh dan membagi informasi. Ikhwal itu dapat kita sebut *keadilan*

informasi. Pemerataan informasi saja tidaklah menjamin terciptanya keadilan itu. Karena itu maka *paradigma komunikasi* dalam globalisasi media massa dan informasi haruslah yang menjamin terwujudnya keadilan informasi. Yaitu paradigma yang bercirikan arus komunikasi dan informasi yang mendarat dan banyak arah. Itu berarti, bahwa harus ada kebebasan bagi setiap orang atau setiap kelompok manusia untuk mengelola sumber daya-sumber daya komunikasi dan informasi tanpa pembatasan yang terlampau ketat. Pembatasan kebebasan komunikasi yang "ketat" adalah yang terlalu bersifat politis dan kurang menghormati tanggung jawab komunikasi secara *hukum* (yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif).¹²

Sistem Nasional Lawan Globalisasi

Di Indonesia sistem media dan sistem komunikasi pada umumnya tentu mengalami pula sentuhan arus globalisasi yang tidak kecil artinya.

Dalam bidang *pers* (media massa cetak) sedang terjadi benturan antara arus globalisasi media massa informasi dan sistem pers nasional (Sistem Pers Pancasila). Kaidah-kaidah jurnalistik media cetak (*pers*) cenderung menerima sebuah sistem yang global pula. Seolah-olah ada sistem pers global, jurnalistik global maupun *wartawan global*. Hal itu dapat dilihat pada liputan-liputan surat kabar yang cenderung banyak menyajikan kejadian-kejadian mancanegara secara rinci (proksimitas global). Perubahan itu seakan-akan mengisyaratkan adanya *liberalisasi jurnalistik*, dalam arti pembatas-

¹⁰Samuel L. Baker, *Discovering Mass Communication*, 1987, 443-451.

¹¹Edwin Emery cs., *Introduction to Mass Communications*, 1965, 3.

¹²L.S. Harms, "The Right to Communicate and Its Achievement Within A New World Information Order," *Media Asia*, Vol. 5, Nr. 4, 1978.

an kebebasan pemberitaan harus diperlonggar. Perubahan tersebut mengakibatkan perlawanan yang keras dari sistem nasional. Jadi, di satu pihak arus globalisasi seakan-akan memaksakan lahirnya kebebasan yang lebih besar bagi sistem pers nasional. Tetapi di lain pihak tuntutan sistem nasional menjadi semakin kuat sebagai reaksi terhadap globalisasi. Sistem nasional mempunyai alasan untuk takut kehilangan jatidiri atau kepribadian. Jika jatidiri pers nasional "hilang", maka pastilah ketahanan budaya bangsa kita (ketahanan nasional) dapat terpengaruh.

Itulah sebabnya regulasi di bidang pers cenderung menjadi ketat. Misalnya, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), telah tampil dengan dukungan sistem politik untuk mempertahankan diri.

Dalam memasuki era globalisasi media massa dan informasi sistem-sistem nasional menjadi amat *sensitif*. Seperti diutarakan di muka, di berbagai bagian dunia yang sedang berkembang muncul nasionalisme budaya (*cultural nationalism*) sebagai jawaban terhadap globalisasi.

Globalisasi media massa juga cenderung mempertegas ciri-ciri ambivalensi pada sistem pers nasional. Pers nasional, misalnya, menganut faham atau teori *kebebasan yang bertanggung jawab*, yang lebih dahulu telah dianut oleh sistem pers demokrasi di Amerika dan di Eropa Barat (*free and responsible press*).

Konsep pers yang "sehat, bebas dan bertanggung jawab" itu kemudian memasuki budaya komunikasi tradisional yang paradigmanya adalah *vertikal*. Yang dimaksud ialah bahwa arus pesan berlangsung satu arah dari atas ke bawah (*top-down*). Itulah sebabnya konsep Pers Pancasila, yang dise-

but sebagai "pers yang sehat, yakni yang bebas dan bertanggung jawab" (sama dengan istilah *free and responsible press*) mengandung konsep pembatasan atau tanggung jawab kebebasan yang bersifat *imprimatur* (Surat Izin Terbit atau SIUPP). Di samping cara pembatasan yang bersifat "mencegah berkomunikasi" diakui pula cara pembatasan atau pertanggung jawaban kebebasan pers melalui lembaga peradilan.

Globalisasi media massa mendorong munculnya reaksi keras dari paradigma budaya komunikasi yang berciri "top-down". Sifatnya seakan-akan transparan dengan munculnya nasionalisme budaya yang diutarakan di muka.

Isu *ketahanan budaya* menjadi semacam kesibukan paling penting di Indonesia dewasa ini dan menjadi bagian paling penting dari isu *ketahanan nasional*. Sedangkan *ketahanan Sistem Pers Pancasila* dalam arti mempertahankan kaidah-kaidah hukum pers seperti diutarakan di atas, merupakan bagian penting dari ketahanan budaya maupun ketahanan nasional (politik).

Dalam mempelajari kecenderungan globalisasi informasi dewasa ini dapat diperkirakan akan lahirnya semacam situasi *kompromis* di Indonesia. Yaitu antara pengaruh globalisasi media massa dan tuntutan sistem nasional. Hal itu telah dapat dilihat pada tuntutan kalangan wartawan agar pemerintah memperhatikan keseimbangan antar kebebasan dan tanggung jawab pers. Yang dimaksud adalah membiasakan pemakaian undang-undang melalui *pengadilan* dalam setiap tindakan pembatasan kebebasan pers. Meskipun pemerintah tetap mempertahankan SIUPP, namun pemerintah pun mempergunakan jalur-jalur hukum (khususnya hukum pidana) untuk berurusan dengan delik-delik pers.

Akan tetapi pada sisi yang lain situasi "kompromis" memperlihatkan keganjilan. Perkembangan industri pers di Indonesia cenderung menghindari konflik dengan tuntutan sistem nasional atau sistem politik. Cara yang ditempuh adalah meniru kecenderungan di negara-negara demokrasi liberal. Isi media massa menggambarkan kerasnya orientasi kepada fungsi *hiburan* yang kurang sehat menurut ukuran nilai-nilai budaya Indonesia (moral Pancasila). Akibatnya, pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH-Pidana) sebenarnya sering harus berurusan dengan banyak macam tulisan (*features*) dan gambar-gambar di majalah-majalah hiburan. Akan tetapi, lembaga *yudikatif* tidak banyak memikirkan aspek seperti itu dalam pelaksanaan fungsi pers nasional. Instansi yang sering disibukkan oleh pelaksanaan fungsi hiburan pers yang tidak sehat ialah Dewan Kehormatan PWI dengan cara melakukan teguran agar penerbitan-penerbitan pers mengindahkan Kode Etik, tetapi sering tidak diindahkan.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik menyangkut pula *fungsi informasi* dan kontrol sosial. Korban pelanggaran Kode Etik Jurnalistik kebanyakan warga masyarakat (individu-individu) yang dianggap kurang memiliki kekuasaan politik, atau lembaga-lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga agama. Pelaksanaan fungsi-fungsi pers nasional dalam globalisasi cenderung tidak lagi senada dengan prinsip-prinsip jurnalistik khususnya kriteria nilai berita. Hal itu disebabkan oleh peranan sistem politik maupun nilai-nilai budaya komunikasi tradisional, yang menentukan cara pelaksanaan fungsi informasi, fungsi kontrol sosial, kritik dan sebagainya dalam UU Pokok Pers. Dalam banyak hal, seperti diutarakan di atas, ha-

nya fungsi *hiburan* media yang menikmati kebebasan.

Penutup

Globalisasi media massa dan informasi menyebabkan lembaga-lembaga media massa di negara-negara Dunia Ketiga menjadi terbuka untuk menerima berbagai nilai baru (kosmopolit). Wartawan menjadi wartawan global atau menjadi kosmopolit. Demikian pula para penulis dan ilmuwan.

Dalam globalisasi media massa (yang diperkuat oleh kemunculan berbagai saluran komunikasi massa yang kian canggih), khalayak media di Indonesia adalah orang-orang yang *lengang*. Mereka berada pada posisi yang tidak lagi terlindung sedikitpun dari terpaan bermacam-macam nilai asing. Situasi komunikasi massa seperti itu (globalisasi) dapat dikatakan menempatkan khalayak (*audience*) pada kondisi kebudayaan dan kerohanian yang penuh dengan polusi. Banyak lembaga tradisional yang tidak lagi sanggup melindungi masyarakat dari polusi kebudayaan yang disebabkan oleh globalisasi informasi dan nilai. Memang masih ada saluran-saluran komunikasi sosial maupun media massa yang tetap bekerja sebagai tandingan bagi arus globalisasi media itu, akan tetapi peranannya ternyata tidak terlalu efektif. Misalnya, lembaga-lembaga agama (lembaga-lembaga dakwah). Informasi tandingan dari lembaga-lembaga seperti itu sebenarnya cukup besar dan dilakukan melalui media massa maupun saluran-saluran komunikasi sosial, akan tetapi keefektifannya relatif kecil.

Globalisasi media massa dan informasi cenderung mendorong perluasan aspirasi kebebasan menyatakan pendapat atau kebe-

basan informasi di masing-masing negara. Di Indonesia aspirasi kebebasan itu ingin mengutamakan pembatasan yuridis melalui pengadilan. Namun, karena sistem yang berlaku tidak/belum memungkinkan hal itu, maka aspirasi kebebasan itu beralih kepada hiburan yang kurang sehat yang justru tidak lagi sesuai dengan tuntutan sistem budaya (norma-norma moral Pancasila). Terjadi semacam kontroversi atau kejanggalan. Tuntutan sistem nasional menjadi ambivalen. Terhadap "kebebasan yang tidak bertanggung jawab politik" dikenakan tindakan berdasar kekuasaan politik (misalnya budaya telepon atau pembatalan SIUPP). Sedangkan terhadap "kebebasan yang tidak bertanggung jawab kultural" tidak dikenakan sanksi politik dan juga tidak dikenakan sanksi hukum.

Khalayak media dalam globalisasi informasi berdiri di tengah-tengah polusi rohani dan polusi kebudayaan (alienasi dan dehumanisasi) tanpa perlindungan karena institusi-institusi tradisional tidak lagi sanggup berperanan sebagaimana mestinya. Informasi pun semakin besar perannya sebagai alat kekuasaan dan tidak lagi berfungsi sebagai alat kesejahteraan bagi umat manusia (*social goods*). Perlindungan yang diharapkan dari institusi-institusi budaya dan hukum tidak lagi bisa diperoleh, karena institusi-institusi itu juga sudah berubah. Meskipun institusi-institusi itu masih berfungsi sebagai acuan dasar atau acuan baku untuk menilai informasi yang tidak sehat, namun efektifitasnya tidak lagi terjamin. Mungkin hal itu disebabkan oleh badan-badan pelaksana (*enforcing agents*) yang juga tidak lagi berperanan sebagaimana mestinya.

Di tengah-tengah arus globalisasi media massa dan nilai, sistem hukum di masing-

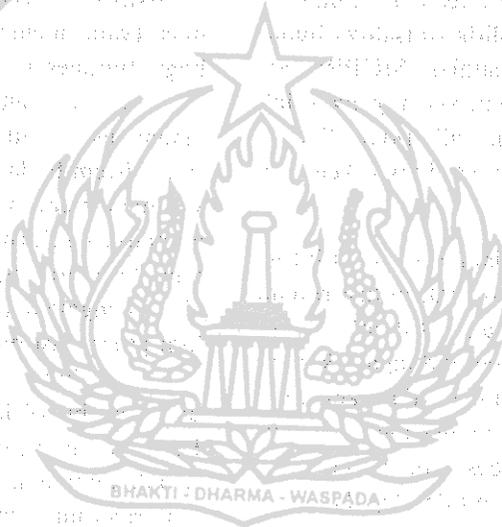
masing negara mengalami guncangan yang hebat. Yurisdiksi atau sistem hukum di Dunia Ketiga dalam hal-hal tertentu seolah-olah mengalami proses pemudaran dan mendukung kehadiran semacam sistem hukum global. Di Indonesia, hal itu terbukti dengan besarnya kebebasan yang dinikmati oleh informasi atau hiburan (*features*) yang melanggar pasal 282 KUH-Pidana. Artinya, pornografi semakin memperoleh definisi yang sempit (terbatas).

Arus globalisasi media massa dan informasi (yang membawa serta nilai-nilai baru bagi Indonesia) mempertajam proses *sosialisasi* bagi banyak orang, terutama kalangan usia muda. Ideologi, sistem politik serta sistem budaya di masing-masing bangsa, mau tidak mau, akan tersentuh oleh globalisasi informasi yang membawa nilai-nilai baru itu. Semua bangsa atau negara akan mengalami proses akulturasi. Akan terjadi pluralisasi budaya yang luas dan tajam di semua bangsa. Nasionalisme pun akan dipengaruhi oleh wawasan internasional. Persepsi dan aspirasi banyak orang menjadi senada tentang keadilan, hak asasi dan kesejahteraan umat manusia.

Globalisasi media massa dan informasi dapat membawa serta perubahan pada acuan-acuan dasar (baku) di masing-masing bangsa. Karena itu banyak bangsa akan mengalami ketidakpastian acuan yang baku dalam memahami sekian banyak dan ragamnya nilai-nilai asing. Tolok ukur itu dapat menjadi lemah perannya karena berubahnya aspirasi maupun persepsi banyak orang tentang makna hidup bernegara. Atau karena adanya tuntutan-tuntutan baru maupun kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masing-masing bangsa.

Globalisasi media massa dapat berdampak keresahan dan gejolak sosio-kultural di masing-masing negara. Hal itu disebabkan oleh pengaruh media global (informasi global) yang terutama menciptakan masyarakat manusia kosmopolitan. Artinya banyak orang merasa tidak betah lebih lama berada pada keadaan ekonominya, kehidupan sosial politiknya dan sebagainya setelah sering menyaksikan kondisi yang lebih sesuai dengan aspirasi mereka di mancanegara.

Meskipun demikian bagi bangsa Indonesia agaknya tolok ukur atau acuan dasar yang masih bisa diandalkan untuk memahami arus globalisasi nilai (yang dibawa oleh globalisasi media massa dan informasi) ialah nilai-nilai agama. Paling tidak, bagi sebagian bangsa Indonesia. Di samping itu dalam globalisasi nilai dan informasi turut pula nilai-nilai agama (globalisasi agama), meskipun globalisasi nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan agama lebih dominan.



BACAAN

- Asian Mass Communication Research and Information Centre 1984, *Mass Media Tradition and Change*.
- Dennis Howitt, *Mass Media and Social Problems*, 1985.
- John Naisbitt & Patricia Aburdene. *MEGATRENDS 2000 Ten New Directions for the 1990's* (Februari 1991).
- Larry A. Samovar et al.. *Understanding Intercultural Communication*, 1985.
- Michael Emery and Ted Curtis Smythe. *Mass Communication*, 1980.
- M. Alwi Dahlan. *Perkembangan Dunia Komunikasi Dasawarsa Sembilanpuluhan* (Makalah pada Seminar Nasional Ilmu Komunikasi 1991, 7-9 Maret, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia).
- Malvin L. de Fleur and Otto N. Larsen. *The Flow of Information, An Experiment in Mass Communication*, 1987.
- The Journal of Development Communication* (Vol. 1, No. 1, 1990). Selangor, Malaysia: Asian Institute for Development Communication.